

**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI SATUAN WILAYAH
PEMBANGUNAN (SWP) IV
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ilmu Ekonomi**



Diajukan Oleh:

STEVANI SHYEH
0711010033 /FE/ IE

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2010**

**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI SATUAN WILAYAH
PEMBANGUNAN (SWP) IV
JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

STEVANI SHYEH
0711010033 /FE/ IE

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2010**

SKRIPSI

ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) IV JAWA TIMUR

Disusun Oleh :

STEVANI SHYEH
0711010033 /FE/ IE

**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh
Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Univeritas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 22 Oktober 2010**

**Pembimbing :
Pembimbing Utama :**

**Tim Penguji :
Ketua**

Drs. Ec. Marseto, DS, MSi

Drs. Ec. Arief Bachtiar, MSi
Sekretaris

Drs. Ec. Marseto, DS, MSi
Anggota

Dra. Ec.Hj. Titik Nur. H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur**

Dr. Dhani Ichsanudin Nur, SE.MM
NIP. 030 202 389

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahnya yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ **ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) IV JAWA TIMUR** ”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada. Walaupun demikian berkat bantuan dan bimbingan yang diterima dari Drs. Ec. Marseto, DS, MSi selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah mengarahkan dari awal untuk memberikan bimbingan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Atas terselesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Marseto, DS, Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sekaligus Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Wali yang telah mengarahkan serta meluangkan waktu guna membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Ec. Wiwin Priana, MT, Dosen Pendamping yang telah mengarahkan serta meluangkan waktu guna membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap staf pengajar dan staf kantor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu dan pelayanan akademik bagi penulis dan semua mahasiswa UPN.
6. Keluarga tercinta yang telah sabar mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang baik moral, material, maupun spiritual. Dan semua keluarga besar serta teman-teman semuanya Semoga mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf instansi, dan Badan Pusat Statistik cabang Surabaya, yang telah memberikan banyak informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa dari Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi, membantu, dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata yang dapat terucapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Desentralisasi fiskal.....	8
2.2.1.1. Sejarah desentralisasi fiskal di Indonesia.....	14
2.2.1.2. Indikator Desentralisasi fiskal.....	18
2.2.1.3. Keuntungan dan kerugian	21
2.2.2. Pendapatan Asli daerah (PAD).....	24
2.2.2.1. Sumber pendapatan daerah.....	26

2.2.2.2.	PAD sebagai bagian pendapatan daerah.....	30
2.2.2.3.	Penyebab Ketergantungan Fiskal.....	30
2.2.3.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP).....	32
2.2.4.	Sumbangan Daerah.....	37
2.2.4.1.	Dana Alokasi Umum.....	39
2.2.4.2.	Dana Alokasi Khusus.....	40
2.2.5.	Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	42
2.2.6.	Perwilayahan.....	45
2.3.	Kerangka Pikir.....	47
2.4.	Hipotesis.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	50
3.2.	Jenis dan Sumber data.....	51
3.2.1.	Jenis Data.....	51
3.2.2.	Sumber Data.....	51
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4.	Teknik Analisis.....	52
3.4.1.	Index Desentralisasi Fiskal.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	54
4.1.1. Gambaran Umum Satuan Wilayah Pembangunan IV	
Provinsi Jawa Timur.....	54
4.1.1.1 Kondisi Umum Kabupaten Jember.....	54
4.1.1.1.1. Letak Geografis.....	54
4.1.1.1.2. Penduduk.....	56
4.1.1.2. Kondisi Umum Kabupaten Bondowoso.....	56
4.1.1.2.1. Letak Geografis.....	56
4.1.1.2.2. Penduduk.....	57
4.1.1.3. Kondisi Umum Kabupaten Situbondo.....	54
4.1.1.3.1. Letak Geografis.....	58
4.1.1.3.2. Penduduk.....	59
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	60
4.2.1. Perkembangan penerimaan pemerintah kabupaten jember.....	60
4.2.2. Perkembangan penerimaan pemerintah kabupaten Bondowoso.....	61
4.2.3. Perkembangan penerimaan pemerintah kabupaten Situbondo.....	62
4.3. Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit	63

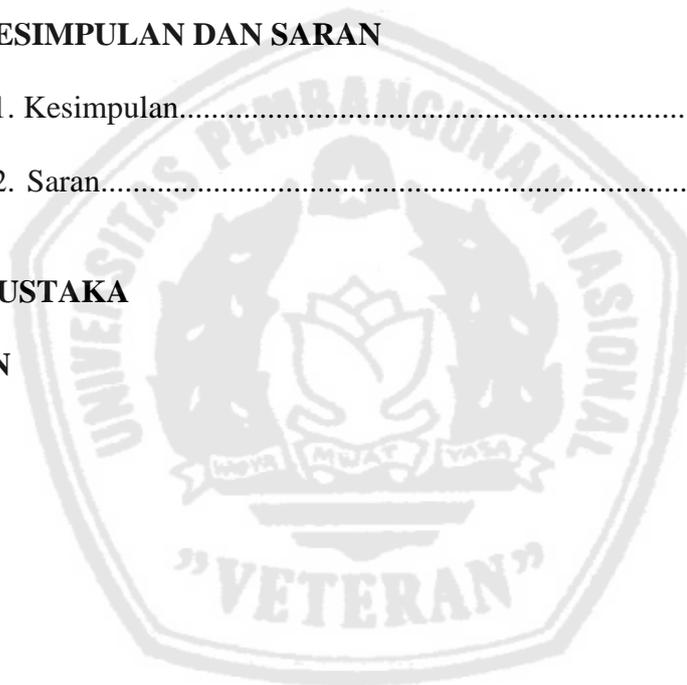
4.3.1. Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal.....	63
4.3.1.1. Uji Analisis Indeks Analisis Fiskal.....	64
4.3.1.2. Uji Analisis Terhadap Pola Hubungan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	70
4.4. Pembahasan.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Perjalanan Desentralisasi Di Indonesia.....	16
Tabel 2.2	: Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal.....	20
Tabel 2.3	: Pola Hubungan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	44
Tabel 4.1	: Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007-2008.....	60
Tabel 4.2	: Penerimaan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007-2008.....	61
Tabel 4.3	: Penerimaan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007-2008.....	62
Tabel 4.4	: Rasio PAD Terhadap TPD, Rasio BHPBP Terhadap TPD Rasio SB Terhadap TPD SWP iv JATIM Tahun 2007.....	65
Tabel 4.5	: Rasio PAD Terhadap TPD, Rasio BHPBP Terhadap TPD Rasio SB Terhadap TPD SWP iv JATIM 2008.....	66
Tabel 4.6	: Hasil Perhitungan Kontribusi PAD Dan Kontribusi BHPBP Terhadap Kontribusi SB Untuk Mengetahui Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Fiskal Th 2007)	68
Tabel 4.7	: Hasil Perhitungan Kontribusi PAD Dan Kontribusi BHPBP Terhadap Kontribusi SB Untuk Mengetahui Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Fiskal Th 2008).....	69
Tabel 4.8	: Hasil Perhitungan Untuk Mengetahui Tingkat Kemandirian Daerah	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Jember 2007
2. Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Bondowoso
2007
3. Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Situbondo
2007
4. Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Jember 2008
5. Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Bondowoso
2008
6. Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Situbondo
2008
7. Tabel PDRB PERKAPITA

ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI SATUAN WILAYAH

PEMBANGUNAN (SWP) IV

JAWA TIMUR

Oleh :

Stevani Shyeh

ABSTRAKSI

Dengan Diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Pengganti Undang- Undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah pada 1 Januari 2001 maka Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336.

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak awal 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu tumpuan dan harapannya adalah dengan cara pemerintah daerah menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dan perbedaan kemandirian fiskal pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo) pada tahun 2007 sampai 2008 dengan menganakan analisis derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV Jawa Timur masih sangat rendah yaitu dibawah 25% dan mempunyai pola hubungan keuangan dengan pemerintah pusat yang bersifat instruktif, hal ini dikarenakan persentase sumbangan daerah lebih besar daripada persentase pendapatan asli daerah dengan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga daerah –daerah tersebut dapat dikatakan belum dapat melaksanakan otonomi daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHPBP), Sumbangan Daerah (SB)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak awal 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu tumpuan dan harapannya adalah dengan cara pemerintah daerah menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan yang dimaksud adalah ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Otonomi Daerah). Kebijakan otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut harus diimbangi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada dasarnya beberapa daerah mempunyai potensi untuk dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memberdayakan masyarakat atau dengan cara mengembangkan potensi yang ada di daerahnya seperti potensi keragaman budaya, objek wisata ataupun industri rumah tangga (home industry) yang beragam, saat ini sepertinya mereka berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Khusaini, 2006 : 32-33)

Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Menurut United Nation Development Program (UNDP) bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah adalah sebagai berikut; desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan desentralisasi pelayanan. (JurnalSkripsi.com, 2005)

Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling banyak berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian terpenting dalam implementasi otonomi daerah. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan alat atau instrument pemerintah yang berperan penting dalam sistem perekonomian, yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi dalam berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan pekerjaan untuk menurun angka pengangguran. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor, maupun yang lainnya. (JurnalSkripsi.com, 2005)

Selain itu juga isu desentralisasi yang dianggap sebagai jalan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian dari banyak ahli, antara lain dikemukakan oleh Tiebout, Oates, Tresch, Breton, Weingast, dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al dalam Sidik (2002) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengalihan sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan analisis faktor yang mempengaruhi Pendapatan

Asli Daerah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP IV) yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.

Pembangunan nasional harus dilakukan melihat berbagai potensi yang ada dan harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Mengingat keterbatasan tenaga yang professional maupun dana yang tersedia maka pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Kondisi yang demikian itu akan mendorong para pelaku pembangunan untuk lebih berorientasi kepada kemampuan sendiri. Dengan mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas desentralisasi maka dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, berdaya guna dan berhasil guna maka dibentuklah daerah otonomi. (Kuncoro, 2004)

Di harapkan terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakasa, dan aspirasi masyarakat daerah. UU No. 22 dan 25 tahun 1999, beserta serangkaian Peraturan Pemerintah, mencoba memberikan alternatif format otonomi daerah yang baru. Ini terlihat dari adanya kesadaran bahwa "pembangunan di daerah" tidak identik dengan "pembangunan daerah". Perubahan struktural yang layak di catat berkat UU ini adalah pelaksanaan otonomi secara utuh dan luas di kabupaten dan kota, sedang provinsi hanya memiliki otonomi daerah terbatas. (Kuncoro, 2004 : 4-5)

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU nomor 5 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang dalam bagian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas diantaranya :

1. Bagaimana tingkat kemandirian fiskal pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo)?
2. Apakah ada perbedaan kemandirian fiskal antar daerah pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan sebagaimana dalam bagian sebelum, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal pada Satuan Wilayah

Pembangunan (SWP) IV (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo).

2. Untuk mengetahui perbedaan kemandirian fiscal antar daerah pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV (Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberi informasi dan sebagai sambungan pemikiran terhadap pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dalam menetapkan kebijakan dalam ketenagakerjaan industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja bagi porsi yang tepat dalam memilih alternatif.
2. Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya bagi penulis atau peneliti yang mengambil topik pendapatan asli daerah yang terkait dengan IDF (Indeks Desentralisasi Fiskal).
3. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan perbendaharaan literatur perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur Khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi.